Menunggu Political Will dalam Pengesahan RUU KUHP

Oleh Tim Peradin
Rabu, 02 Desember 2015 14:54 -

"



KORAN SINDO

SELASA 1 DESEMBER 2015

Menunggu Political Will dalam Pengesahan RUU KUHP

FRANS H WINARTA

Ketua Umum PERADIN dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Sedari dulu pro dan kontra RUU KUHP hanya berkutat pada permasalahan rumusan delik-delik tertentu yang menimbulkan perdebatan tidak berujung. Padahal, ancaman nyata kejahatan era sekarang sudah semakin berkembang dan bahkan mengandung teknologi tinggi yang tidak terbayangkan oleh nenek moyang kita.

Masyarakat nasional dan mengancam masyarakat seperti kejahatan siber (*cyber crime*), pencucian uang, terorisme, *human trafficking*, *drugs trafficking*, kejahatan transnasional, serta korupsi sudah mendunia.

Persoalan lain penegakan hukum di Indonesia adalah integritas dan profesionalisme penegak hukum sudah menjadi rahasia umum.

Abaikan Kepentingan Golongan

Sepertinya Indonesia belum adakonsensuspolitik yang tinggi untuk menyelesaikan hukum pidana nasional yang dapat dibanggakan. Anggota DPR RI belum menyadari kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara memiliki KUHP baru. Yang terlihat oleh masyarakat adalah kepentingan golongan lebih diutamakan tanpa benar-benar menggodok RUU KUHP tersebut dengan memerankan seharah bermanfaat dan kebijakan (wisdom) demi penegakan hukumyanglebihbaikkedepan.

Pro-kontra dimasukkan atau tidaknya delik-delik yang diatur dalam UU Khusus dalam RUU KUHP bukan per-

[Selengkapnya...](#)